

## BAB VI

### KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari jumlah penduduk miskin, rasio gini dan upah minimum kabupaten/kota terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun yang terjadi selama periode tahun 2010 sampai dengan 2015 yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun dengan nilai koefisien sebesar  $-0,066035$  dan probabilitas signifikan sebesar  $0,0000$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan berarti apabila jumlah penduduk miskin naik maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel rasio gini berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun dengan nilai koefisien sebesar  $0,101271$ , dan probabilitas signifikan sebesar  $0,0012$ . Hal ini berarti apabila rasio gini naik maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun dengan nilai koefisien sebesar 0,064961 dan probabilitas signifikan sebesar 0,0000. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang berarti apabila upah minimum kabupaten/kota naik maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Jumlah penduduk miskin perlu terus ditekan sehingga kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun dapat diturunkan guna untuk meningkatkan pembangunan manusia. Peran aktif pemerintah diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun. Dengan berkurangnya kemiskinan diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
2. Ketimpangan distribusi pendapatan tetap perlu ditekan sehingga pendapatan disetiap lapisan masyarakat dapat merata. Pemerataan distribusi pendapatan harus lebih ditingkatkan, hal lain yang perlu

dilakukan adalah mendorong tingkat pendapatan masyarakat terutama kelas peningkatan pendapatan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah adalah agar pemerataan pendapatan yang terjadi juga diikuti adanya penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Sehingga dengan terwujudnya kondisi tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun.

3. Upah minimum kabupaten/kota tetap perlu untuk ditingkatkan guna mendorong pendapatan masyarakat. Dengan begitu masyarakat diharapkan mempunyai daya beli yang lebih besar dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tingkat kesehatan dan pendidikan juga dapat meningkat. Sehingga dengan terwujudnya kondisi tersebut diharapkan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya mencakup tiga variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) yaitu jumlah penduduk miskin, rasio gini dan upah minimum kabupaten/kota. Bagaimanapun terlepas dari ketiga faktor tersebut masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Karena adanya keterbatasan data *time series* dan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan faktor-faktor lain dan juga metode

lainnya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) sehingga diharapkan dapat memberikan analisis data yang lebih baik terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun.